

## Pengaruh Modal Sosial Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia

### *The Effect Of Social Capital On Tax Avoidance In Indonesia*

Ina Dian Permata<sup>1</sup>, Ari Budi Kristanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana,  
 inadprmt@gmail.com

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana,  
 ari.kristanto@uksw.edu

Info Artikel	Abstrak
<p>Diterima 2 Mei 2020</p> <p>Direvisi 16 Mei 2020</p> <p>Dipublikasi 18 Juni 2020</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah modal sosial dimana perusahaan beroperasi akan mempengaruhi kegiatan penghindaran pajaknya. Penelitian ini memakai data sekunder berupa data-data keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2018, serta hasil survei Statististik Modal Sosial Indonesia tahun 2017. Sampel yang dipilih menggunakan metode <i>purposive sampling</i> menghasilkan sebanyak 222 sampel. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu regresi linier berganda, dengan modal sosial sebagai variabel independen, dan penghindaran pajak perusahaan sebagai variabel dependen. Modal sosial diukur menggunakan Indeks Modal Sosial berdasarkan survei Badan Pusat Statistik. Penghindaran pajak diukur menggunakan <i>proxy Effective Tax Rate</i> (ETR). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p><i>Modal sosial,          Penghindaran Pajak</i></p>	
<p><b>Keywords :</b> <i>Social Capital,          Tax Avoidance</i></p>	<p><b>Abstract</b></p> <p><i>This study aims to determine whether the social capital in which the company operates will affect its tax avoidance activities. This study uses secondary data in the form of financial data taken from the financial statements of manufacturing companies in 2018, as well as the results of the Indonesian Social Capital Statistics survey in 2017. Samples selected using the purposive sampling method produced 222 sample companies. Data analysis techniques used are multiple linear regression, with social capital as an independent variable, and corporate tax avoidance as the dependent variable. Social capital is measured using the Social Capital Index based on a Central Statistics Agency survey. Tax avoidance is measured by an Effective Tax Rate (ETR) proxy. Based on the results of the analysis shows that social capital has a negative effect on tax avoidance.</i></p>

## PENDAHULUAN

Indonesia menggunakan sistem pemungutan untuk pajak berupa *Self Assessment System* yang dimana masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembayaran pajak. Menurut Soliha, Wibisono, & Hermawan (2019) *Self Assessment System* adalah sistem untuk memungut pajak yang kegiatan hitung, setor, dan laporanya dipercayakan seutuhnya pada wajib pajak. Penetapan *Self Assessment System* yang diberlakukan pemerintah merupakan tindakan supaya penerimaan pajak dapat berjalan optimal. Dibutuhkannya tingkat kesadaran dari dalam diri setiap orang yang memiliki tanggung jawab perpajakan supaya penerimaan pajak dapat mencapai target. Oleh sebab itu, setiap orang yang memiliki kewajiban pajak dituntut untuk bersikap jujur berkaitan dengan pembayaran pajaknya. Rahayu (2010) menyatakan bahwa *Self Assessment System* memiliki tujuan yaitu memunculkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak agar patuh pada hukum perpajakan. *Self Assessment System* dapat berhasil apabila setiap orang yang memiliki kewajiban dalam hal pajak mempunyai kesadaran tingkat tinggi untuk melakukan pembayaran pajak (Suminarsasi 2011).

Perilaku wajib pajak atas tanggung jawab perpajakannya, dapat terkait dengan norma-norma sosial di sekitarnya. Sehingga teori mengenai pembelajaran sosial dapat menjelaskan bagaimana wajib pajak dalam berperilaku, ketika menjalankan kewajiban dalam hal perpajakan. Sedangkan terdapat tiga faktor penentu kecenderungan seseorang dalam berperilaku, salah satunya adalah *normative belief*. Ajzen (1991) Faktor ini merupakan keyakinan dalam diri individu terhadap seseorang yang menjadi referensinya, misalnya rekan, sanak saudara, serta kerabat terdekat. *Normative belief* merupakan sikap percaya terhadap seseorang atau kelompok yang mempengaruhi perilaku individu. Sesuai dengan teori tersebut, bahwa perilaku seseorang salah satunya dapat dipengaruhi oleh norma atau nilai yang berkembang di lingkungan sekitar. Hubungan individu dengan masyarakat merupakan salah satu aspek dalam modal sosial.

Peran modal sosial dapat dikatakan penting untuk kehidupan bermasyarakat lantaran merupakan aset sosial yang memungkinkan individu dan masyarakat bekerja lebih efisien. Menurut Putnam (2016) modal sosial merupakan komponen organisasi sosial yang meliputi kepercayaan, norma, serta jaringan yang dapat menumbuhkan efisiensi dalam bermasyarakat. Indeks Modal Sosial yang ada

Indonesia tentunya beragam, hal ini disebabkan karena adanya berbagai macam ras, suku, dan budaya di setiap wilayah. Keanekaragaman budaya tersebut menyebabkan adanya perbedaan perilaku antara masyarakat di lingkungan kota dengan masyarakat di lingkungan pedesaan. Kebiasaan masyarakat di suatu tempat yang menjunjung tinggi religiusitas akan berbeda dengan kebiasaan masyarakat di tempat lainnya.

Dengan demikian, norma sosial yang berkembang di masyarakat akan terkait dengan perilaku seseorang, sehingga dapat juga berdampak secara khusus pada perilaku kepatuhan pajak di Indonesia. Bidin dan Shamsudin (2013) telah menunjukkan bahwa norma subjektif merupakan unsur yang mempengaruhi perilaku patuh terhadap pajak. Menurut Wanarta dan Mangoting (2014) keadaan modal sosial yang baik, akan mendorong manusia untuk melakukan hal yang baik pula, sehingga akan muncul tanggung jawab sosial yang lebih baik. Mengingat mengenai *Self Assessment System* yang mengandalkan kesadaran setiap wajib pajak, maka akan dapat menimbulkan potensi tindak kecurangan seperti melakukan kegiatan penghindaran pajak. Benk, Budak, and Cakmak (2011) menyatakan bahwa wajib pajak dengan sikap moral kurang baik akan beranggapan bahwa pajak merupakan sesuatu yang tidak penting, sehingga dapat menjalankan penghindaran pajak. Hidayat dan Nugroho (2003) mengatakan bahwa niat tidak patuh dalam diri wajib pajak dapat disebabkan oleh norma subjektif serta kewajiban moral.

Pemungutan pajak yang diterapkan di Malaysia sama halnya dengan di Indonesia yaitu dengan *self assessment system* yang dimana wajib pajak akan bertanggung jawab atas tanggung jawab perpajakannya. Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak kesamaan dalam hal etika dan norma kepada masyarakat seperti selalu menjunjung nilai-nilai sosial dengan baik. Meskipun moral dan nilai yang ditanamkan antara Malaysia dengan Indonesia terdapat kesamaan, namun ada perbedaan terkait kesadaran dari dalam diri wajib pajaknya. Menurut data yang dipublikasikan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* OECD (2001), *Tax Ratio* negara Malaysia lebih tinggi dibandingkan Indonesia. *Tax Ratio* Malaysia sebesar 15,3% sedangkan *Tax Ratio* Indonesia lebih rendah yaitu sebesar 11,9 Setiawan (2015). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan, kepedulian dan tingkat partisipasi warga Malaysia dan Indonesia dalam hal

perpajakan berbeda. Sehingga dalam penelitian ini relevan untuk direplikasi di Indonesia karena kondisi Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan terkait dengan kepatuhan pajaknya. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Indonesia beserta Indeks Modal Sosial yang berbeda setiap wilayahnya. Masyarakat di Indonesia yang masih menjunjung tinggi budaya asli mereka, menyebabkan nilai-nilai asli budaya yang ada dalam kehidupan mereka masih sangat kental. Sikap masyarakat yang menjunjung budaya ini dapat terkait dengan pola pikir mereka, sehingga ada batasan dalam pola berpikirnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang tersebut, sehingga akan dibahas lebih lanjut mengenai modal sosial beserta kegiatan perpajakannya berupa kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Dengan segala keunikan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, sehingga menarik untuk diteliti apakah modal sosial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak? Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh modal sosial terkait dengan perilaku perusahaan dengan pelaksanaan penghindaran pajak. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan manfaat bagi pihak yang akan mendirikan perusahaan, agar dapat mempertimbangkan letak perusahaan yang strategis dengan modal sosial yang baik. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai perspektif yang mencakup pentingnya modal sosial bagi keberlangsungan perusahaan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Modal sosial**

Ardani (2017) menjelaskan bahwa modal sosial yaitu keseluruhan sumber daya berunsur sosial yang dimiliki masyarakat, agar setiap tindakan dapat bermanfaat dan berjalan dengan efektif dan efisien. Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa modal sosial berkaitan dengan hubungan sosial serta melekat dengan jaringan sosial yang didasarkan pada saling mengakui dan saling kenal. Modal sosial dianggap sebagai aset penting di kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam konteks ini modal sosial tidak diartikan sebagai modal berbentuk uang atau harta kekayaan Hanifan (1916). Secara sederhana, modal sosial didefinisikan sebagai kumpulan nilai maupun norma di masyarakat. Menurut Harsono (2014) modal sosial mencakup tiga poin penting, yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan

sosial di lingkungan masyarakat. Jousairi (2006) memberikan pendapat mengenai modal sosial merupakan hal yang berhubungan dalam rangka memperoleh potensi hidup yang lebih baik dapat ditopang oleh norma yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, modal sosial dianggap sebagai sumber daya yang berharga dalam relasi antar manusia, yang bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan diri atau kelompoknya. Oleh karena itu modal sosial mengacu pada keadaan sosial, nilai, norma serta budaya di masyarakat yang mengatur interaksi antar individu atau lembaga dimana modal sosial tertanam. Individu wajib memiliki modal sosial yang baik untuk menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat harus terakut dengan moral tradisional seperti bertanggung jawab terhadap norma dan pekerjaan bersifat jujur serta dapat memegang komitmen. Pada akhirnya modal sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) modal sosial yaitu sumber daya yang terkait dengan jaringan sosial antar manusia, sehingga besarnya modal sosial dapat tergantung pada kecakapan sosial yang ada pada individu tersebut. Di Indonesia telah dilakukan pengukuran modal sosial berdasarkan survei oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017. Modal sosial yang terdapat di Indonesia terbagi dalam tiga indikator. Pertama adalah toleransi dan sikap percaya dapat digambarkan oleh sikap toleransi terhadap perbedaan suku dan agama serta sikap percaya yang dimiliki masyarakat kepada para tokoh di lingkungan desa. Kedua adalah partisipasi dalam kelompok dan jejaring, yaitu kemampuan yang dimiliki tiap orang untuk menjalin hubungan sosial dan berkomunikasi dengan orang lain. Partisipasi dalam kelompok dan jejaring yang dapat digambarkan melalui keanggotaan dalam berbagai organisasi di lingkungan, sehingga dapat meningkatkan potensi yang mereka miliki dalam menghadapi berbagai konflik dalam kehidupan. Ketiga adalah resiprositas dan aksi bersama dapat digambarkan melalui adanya kemauan setiap anggota rumah tangga untuk membantu warga lain yang membutuhkan pertolongan.

Modal sosial yang terdapat di Indonesia dapat tercermin dalam hal budaya gotong royong antar masyarakatnya. Tingginya Indeks Modal Sosial juga semakin terasa dengan tingkat solidaritas yang tinggi antar umat beragama. Modal sosial terjadi melalui hubungan sosial antar sesama manusia serta mengarah kepada

norma dan jejaring antar manusia di dalam kelompok. Modal sosial pada level mikro akan membahas hubungan manusia secara horizontal mengenai rumah tangga, individu maupun masyarakat dalam komunitas tertentu. Interaksi yang terjalin tersebut akan menjamin individu untuk patuh terhadap norma.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak yaitu sebuah usaha perusahaan dalam rangka membuat beban pajak di perusahaan menjadi minim Muzakki (2015). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) termasuk perbuatan yang legal, dengan memanfaatkan celah dari aturan yang berlaku, dengan cara mengecilkan beban pajak yang harus dibayarkan Sari (2013). Zain (2005) berpendapat bahwa penghindaran pajak termasuk tindakan pengendalian pajak agar terbebas dari konsekuensi kewajiban pajak yang tidak diinginkan. Sedangkan upaya untuk meminimalisir jumlah pajak dibayar, dianggap tidak menyalahi aturan. Menurut Maharani dan Suardana (2014) penghindaran pajak termasuk suatu perkara yang unik, karena di salah satu sisinya di ijinakan namun disisi lain tidak diinginkan. Secara keseluruhan, penghindaran pajak dapat dilakukan dalam tiga hal yaitu, pemanfaatan perbedaan tarif, menunda penghasilan, dan memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak.

### **Modal Sosial terhadap Penghindaran pajak**

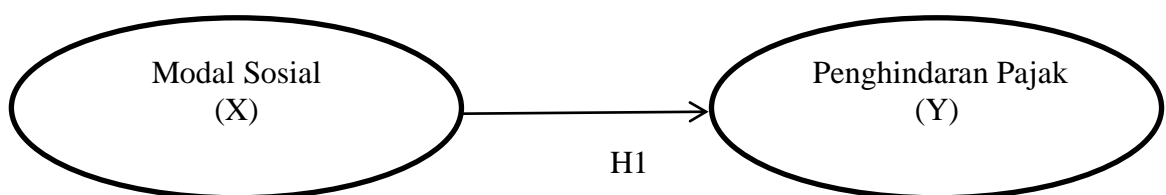
Modal sosial tidak hanya mempengaruhi perilaku individu tetapi juga kemungkinan mempengaruhi keputusan perusahaan Chircop et al (2018). Teori legitimasi dan norma sosial mendukung pandangan bahwa Indeks Modal Sosial dimana perusahaan berada mempengaruhi perilaku perusahaan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa ada kebutuhan bagi perusahaan untuk diterima dimana perusahaan itu berlokasi. Sehingga perusahaan akan membangun kesesuaian antara nilai sosial atau norma perilaku untuk dapat diterima di lingkungannya. Sedangkan norma sosial menjelaskan bahwa nilai sosial ataupun norma di mana organisasi tersebut didirikan akan mempengaruhi manajemen.

Badan Pusat Statistik (2017) memperlihatkan hasil perhitungan Indeks Modal Sosial pada tahun 2017 bahwa Indeks Modal Sosial di wilayah pedesaan lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan. Lantaran masyarakat di pedesaan umumnya masih menjunjung norma, budaya setempat dan memiliki sikap percaya yang lebih tinggi dari pada masyarakat kota. Tingginya Indeks Modal Sosial dapat tercermin dengan tercapainya tiga dimensi modal sosial, seperti ketika Indonesia

sedang dilanda musibah, sehingga akan muncul rasa solidaritas masyarakat dengan melakukan aksi sosial. Modal sosial yang kuat menurut Fukuyama (1995) apabila didalam lingkungan masyarakat terdapat norma yang saling berbalas, membantu, serta terjalin kerjasama melalui jaringan sosial masyarakat. Dengan melakukan aksi sosial tersebut, maka ketiga dimensi modal sosial dapat terpenuhi.

Ketika perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan akan memperoleh legitimasi oleh masyarakat. Pandangan dari masyarakat ini dapat mempertahankan nama baik perusahaan dengan otoritas pajak dan lebih menaati peraturan perpajakan. Penghindaran pajak rentan terhadap tuduhan keserakahan dan keegoisan, sehingga dapat merusak reputasi serta menghancurkan kepercayaan publik. Menurut Lanis and Richardson (2012) penghindaran pajak tidak memiliki tanggung jawab sosial, karena jelas menyalahi norma sosial yang ada. Dengan adanya perilaku altruistik dan jujur yang terkait dengan modal sosial, diharapkan akan menimbulkan relasi negatif antara modal sosial dan kegiatan penghindaran pajak perusahaan. Berlakunya tindakan manajerial dalam rangka meminimalkan pajak perusahaan dengan pajak agresif melibatkan masalah etika yang signifikan Lanis dan Richardson (2012). Modal sosial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak secara signifikan lebih kuat untuk perusahaan di daerah dengan religiusitas tinggi Chircop et al., (2018). Perusahaan yang berlokasi di wilayah Indeks Modal Sosial tinggi akan merasa bertanggung jawab kepada lingkungannya. Penelitian Chircop et al., (2018) juga mengungkapkan adanya efek negatif yang menyatakan bahwa modal sosial dimana perusahaan berada akan menghambat kegiatan penghindaran pajaknya. Dari perspektif tersebut, maka diharapkan adanya hubungan yang bersifat negatif antara modal sosial dengan kegiatan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

**H1** : *Modal sosial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.*



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan memakai data sekunder dalam bentuk *cross section* yang bersumber dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah *data* dan sumber *data* yang digunakan:

**Tabel 1.** Data dan Sumber Data

Variabel	Data	Sumber Data
Modal Sosial	- Informasi mengenai alamat operasi perusahaan	- Laporan Keuangan Tahunan
	- Indeks Modal Sosial menurut klasifikasi wilayah	- Statistik Modal Sosial 2017
Penghindaran Pajak	- Total aset - Laba sebelum pajak - Beban pajak penghasilan	- Laporan Keuangan Tahunan

Populasi dari penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018. Metode yang digunakan untuk penentuan sampel adalah metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018; (2) Perusahaan memiliki data laporan keuangan lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan mencakup data mengenai pajak perusahaannya; (3) Perusahaan tidak mengalami rugi atau bernilai negatif dalam laba sebelum pajak selama periode;

### Variabel Penelitian

#### Variabel Independen

Penelitian ini menerapkan modal sosial sebagai variabel independen. Pengukuran modal sosial berdasarkan daerah dianggap lebih komprehensif menurut Rupasingha, Goetz dan Freshwater (2000). Data mengenai modal sosial diperoleh berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (2017) berupa Statistik Modal Sosial dengan menggunakan Indeks Modal Sosial menurut klasifikasi wilayah. Publikasi yang dilakukan BPS ini berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2017 (SPTK). Perhitungan indeks yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2017) menggunakan metode analisis faktor eksploratori. Modal sosial dalam penelitian ini menyajikan persentase rumah tangga sesuai provinsi yang diukur berdasarkan tiga dimensi modal sosial.



Dimensi pertama adalah toleransi dan sikap percaya, dimensi kedua adalah partisipasi dalam kelompok dan jejaring, dan dimensi ketiga adalah resiprositas dan aksi bersama. Modal sosial yang dimiliki perusahaan dapat dilihat melalui nilai Indeks Modal Sosial sesuai dengan alamat perusahaan yang tercantum di laporan keuangan. Menurut survei Badan Pusat Statistik (2017) Indeks Modal Sosial pedesaan akan lebih besar daripada Indeks Modal perkotaan. Pengukuran Indeks Modal Sosial menggunakan skala 0-100. Semakin besar Indeks Modal Sosial di suatu wilayah, maka akan semakin baik kondisi sosial yang terkandung.

### Variabel Dependen

Variabel dependen yang diterapkan yaitu penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak memakai rasio *effective tax rate* (ETR) Lanis and Richardson (2012). Nilai ETR yang rendah menunjukkan semakin tingginya kemampuan penghindaran pajak. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk pengukuran ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang dipakai yaitu ukuran perusahaan (*size*). Variabel kontrol ini menunjukkan ukuran suatu perusahaan dengan melihat besar kecilnya aset yang dimiliki. Variabel kontrol ini menggunakan *natural log* sebagai *proxy* untuk menghitung ukuran perusahaan. Perusahaan dengan total aktiva yang besar, maka semakin menghasilkan laba yang tinggi. Lanis & Richardson (2012) menyebutkan bahwa, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah pula nilai ETR. Sudarmadji dan Sularto (2007). Berikut merupakan rumus untuk menentukan ukuran perusahaan:

$$Size = \text{Ln (Total Aset)}$$

### Model dan Teknik analisis

Penelitian ini menerapkan regresi linier berganda sebagai metode untuk mengukur kekuatan hubungan antara modal sosial dengan penghindaran pajak, serta mengetahui arah hubungan variabel apakah terdapat hubungan negatif atau positif. Penelitian ini menerapkan *effective tax rate* sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen yang dipakai yaitu ukuran perusahaan (*size*). Model regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$H1 = ETR_{it} = X_0 + X_1SK_{it} + X_2SIZE_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

ETR<sub>it</sub> : Tingkat Penghindaran Pajak

SK : Modal Sosial

SIZE : Ukuran Perusahaan

e<sub>it</sub> : Error

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka hipotesis akan diterima apabila nilai Indeks Modal Sosial dan nilai *Tax Avoidance* yang dihitung menggunakan ETR menunjukan skor yang tinggi. Modal sosial yang dimiliki perusahaan dapat dilihat melalui Indeks Modal Sosial sesuai dengan alamat perusahaan tersebut berlokasi. Skor ETR yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan tidak agresif terhadap pajak sehingga tingkat penghindaran pajaknya akan rendah. Skor ETR dapat dikatakan tinggi apabila beban pajak lebih besar dari laba sebelum pajak. Sehingga nilai Indeks Modal Sosial yang tinggi akan menyebabkan tingkat penghindaran pajaknya rendah. Selain itu, hipotesis akan diterima apabila koefisien Modal Sosial menghasilkan nilai positif. Penjelasan ini akan selaras dengan hipotesis yang menyatakan bahwa modal sosial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel berikut merupakan sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan *go public* terkecuali perusahaan pada sektor keuangan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018. Berikut merupakan data yang telah diperoleh setelah dilakukannya *purposive sampling*.

**Tabel 2.** Populasi dan Sampel Tahun 2018

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan <i>go public</i> selain perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2018.	485
2.	Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan.	(56)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki informasi lengkap terkait dengan penelitian	(112)
4.	Perusahaan yang mengalami rugi atau laba sebelum pajak yang bernilai negatif.	(95)
<b>Total observasi</b>		<b>222</b>

*Sumber : Data Diolah, 2020*

### Analisis Statistik Deskriptif

Data statistik dalam penelitian ini menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata beserta standar deviasi semua variabel sesuai dengan informasi pada tahun 2018. Dalam penelitian ini statistik deskriptif berfungsi untuk mengetahui gambaran mengenai modal sosial dan *size* terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 3.** Statistik Deskriptif

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
<b>Industri Bahan Baku</b>				
ETR	0,01	0,44	0,24	0,09
Indeks Modal sosial	38,71	48,10	44,12	2,53
Size (dalam jutaan rupiah)	8.052	56.648.222	6.114.883	12.546.567
<b>Industri Manufaktur</b>				
ETR	0,00	0,45	0,23	0,09
Indeks Modal sosial	41,66	54,96	46,62	3,29
Size (dalam jutaan rupiah)	1.888	96.537.796	6.557.941	13.644.312
<b>Industri Jasa</b>				
ETR	0,00	0,83	0,23	0,19
Indeks Modal sosial	41,66	54,62	45,47	2,76
Size (dalam jutaan rupiah)	42.622	206.196.000	14.279.151	28.298.157
<b>Total</b>				
ETR	0,00	0,83	0,23	0,15
Indeks Modal sosial	38,71	54,96	45,76	3,04
Size (dalam jutaan rupiah)	1.888	206.196.000	10.761.781	22.233.652

*Sumber: Hasil Output SPSS*

Berdasarkan tabel 3 disajikan nilai ETR berkisaran antara 0,00 sampai 0,83 yang mana nilai minimum ETR dimiliki oleh PT Madusari Murni Indah Tbk. pada industri manufaktur dan PT Mega Manunggal Property pada industri jasa. Sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 0,85 dimiliki oleh perusahaan PT Arkadia Digital Media pada industri jasa. Nilai rata-rata ETR pada industri bahan baku menunjukkan hasil lebih besar dari industri lainnya yaitu sebesar 0,24. Semakin besar nilai ETR menandakan bahwa semakin kecil terjadinya perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak pada industri bahan baku lebih kecil dibandingkan dengan industri manufaktur dan industri jasa.

Nilai rata-rata untuk Indeks Modal Sosial pada industri manufaktur lebih besar daripada industri lainnya yaitu sebesar 46,62. Hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur berlokasi di daerah dengan Indeks Modal Sosial yang tinggi

dibandingkan dengan lokasi industri bahan baku dan industri jasa. Nilai minimum modal sosial dimiliki oleh PT Mitra Investindo Tbk pada perusahaan sektor industri bahan baku yaitu sebesar 38,71. Sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 54,96 terdapat pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada industri manufaktur. Nilai rata-rata Indeks Modal Sosial dalam penelitian ini menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan Indeks Modal Sosial Indonesia yang menyentuh angka 47,86. Sedangkan Badan Pusat Statistik (2017) menyatakan bahwa Indeks Modal Sosial perusahaan yang kurang dari Indeks Modal Sosial Indonesia maka dianggap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya perusahaan yang berlokasi di provinsi DKI Jakarta, dimana Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan Indeks Modal Sosial yang terendah di Indonesia.

Nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 1.888 juta rupiah terdapat pada PT Sat Nusapersada Tbk pada industri manufaktur. Sedangkan nilai maksimum mencapai nilai 206.196.000 juta rupiah dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia pada perusahaan sektor jasa. Nilai rata-rata ukuran perusahaan pada industri jasa lebih besar dibandingkan industri lainnya yaitu sebesar 14.279.151 juta rupiah. Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa ambang penghindaran pajaknya semakin tinggi. bahwa variabel *size* secara positif terkait dengan variabel independen yang ada. Sebagaimana dibuktikan bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin tinggi juga kejadian melakukan kegiatan penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini *size* dapat berhasil menjadi variabel kontrol.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, maka data yang telah diperoleh akan diuji dengan uji asumsi klasik, agar model penelitian ini dapat digunakan. Dengan dilakukannya uji asumsi klasik maka diharapkan dapat menghindari terjadinya bias karena tidak seluruh data diterapkan regresi. Uji asumsi klasik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas.

**Tabel 4.** Hasil Uji Asumsi Klasik

Nama Uji	Alat Uji	Hasil		Keterangan
		Modal Sosial (Sig.)	Size (Sig.)	
Uji Normalitas	<i>P-Plot</i>	Titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal		Terdistribusi normal
Uji Linieritas	<i>Test for Linearity</i>	0,985	0,354	Berpola Linier
Uji Heteroskedastisitas	<i>Glejser</i>	0,126	0,329	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Output SPSS

Uji normalitas dalam penelitian ini memakai metode *P-Plot*. Menurut Gozali (2012) model regresi yang baik akan memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grafik *P-Plot* terlihat titik-titik yang memencar disekitar garis diagonal, hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa data residual berdistribusi secara normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

Uji linieritas menggunakan metode *Test for Linearity*. Menurut Gozali (2016) uji linieritas berfungsi untuk mengetahui apakah model yang dipakai itu benar. Nilai signifikansi yang tertera pada Tabel 4 sebesar 0,985 untuk modal sosial. Sedangkan nilai signifikansi untuk *size* menunjukkan hasil 0,354. Berdasarkan nilai signifikansi tersebut menunjukkan angka lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua model regresi berpola linier. Kemudian dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis selanjutnya.

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser. Ketika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka tidak akan terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,126 untuk variabel modal sosial dan 0,329 untuk variabel kontrol *size*. Semua nilai signifikansi menunjukkan nilai diatas 0,05, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Model regresi yang baik, tidak akan terjadi gejala heteroskedastisitas. Semua nilai signifikansi menunjukkan nilai diatas 0,05, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Analisis Regresi****Tabel 5.** Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji Statistik t	B	t	Sig.	Keterangan
Modal Sosial	0,008	2,018	0,045	Berpengaruh positif
Size	-0,422	-2,385	0,018	Berpengaruh negatif
Adjusted R <sup>2</sup>			0,016	

Sumber: Hasil Output SPSS

Uji regresi tabel dalam penelitian ini memakai metode *one sample t-Test*. Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,045 untuk variabel modal sosial dan signifikansi sebesar 0,018 untuk variabel *size*. Nilai signifikansi kedua variabel menunjukkan hasil kurang dari 0,05. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel modal sosial berpengaruh positif terhadap ETR dan *size* berpengaruh negatif terhadap ETR. Nilai koefisien regresi variabel modal sosial (X) menunjukkan nilai sebesar 0,008. Hal ini memiliki arti bahwa setiap peningkatan modal sosial sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan ETR sebesar 0,008 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Nilai koefisien regresi variabel *size* bernilai negatif sebesar -0,422. Hal ini memiliki arti bahwa setiap penurunan total aset perusahaan sebesar 1 satuan maka, akan menambah nilai ETR sebesar 0,422 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. Dengan demikian terbukti bahwa modal sosial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) memiliki nilai sebesar 0,016 atau sama dengan 1,6%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel modal sosial (X) berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak (Y) sebesar 1,6%. Sedangkan nilai selisihnya sebesar 98,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Sehingga dalam penelitian ini *size* terbukti dapat berhasil menjadi variabel kontrol.

**Pembahasan**

Hipotesis penelitian ini berhasil dibuktikan, dimana modal sosial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chircop et al., (2018) yang menyatakan bahwa modal sosial berpengaruh negatif terkait dengan penghindaran pajak. Kondisi perusahaan akan mengikuti kondisi sosial masyarakat yang terdapat disekitar perusahaan tersebut berdomisili. Perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan Indeks Modal Sosial tinggi akan merasa bertanggung jawab kepada lingkungannya, sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan kegiatan yang

menyimpang. Indeks Modal Sosial yang rendah akan menyebabkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga modal sosial dimana perusahaan berdomisili akan mempengaruhi perilaku perusahaan. Rata-rata Indeks Modal Sosial yang rendah dapat disebabkan karena banyaknya perusahaan berlokasi di provinsi-provinsi dengan Indeks Modal Sosial tergolong rendah seperti DKI Jakarta. Penelitian lainnya mengatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di daerah dengan Indeks Modal Sosial yang tinggi menunjukkan tingkat tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih baik Jha and Cox (2015). Chircop et al., (2018) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di daerah-daerah dengan Indeks Modal Sosial tinggi kurang terlibat secara signifikan dalam kegiatan penghindaran pajak. Penelitian ini juga sesuai dengan Boone, Khurana, and Raman (2012) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial berperan dalam keputusan perencanaan pajak.

Indeks Modal Sosial dengan rata-rata terendah terdapat pada perusahaan sektor industri bahan baku. Wilayah operasional perusahaan industri umumnya berlokasi di wilayah Kalimantan, yang mana provinsi ini memiliki Indeks Modal Sosial yang lebih rendah dari Indeks Modal Sosial Indonesia. Data yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (2017) bahwa sebagian wilayah Kalimantan termasuk dalam 10 provinsi dengan Indeks Modal Sosial terendah di Indonesia. Sedangkan Indeks Modal Sosial dengan rata-rata tertinggi terdapat pada perusahaan sektor manufaktur. Pada perusahaan manufaktur wilayah operasionalnya tersebar di Pulau Jawa, yang mana provinsi di pulau Jawa mempunyai Indeks Modal Sosial lebih tinggi atau sama dengan Indeks Modal Sosial Indonesia.

Disetiap Indeks Modal Sosial memiliki dimensi masing-masing yang berkontribusi untuk menjadi suatu nilai modal sosial. Dimensi aksi bersama dan resiprositas memiliki kontribusi paling besar dalam penyusunan Indeks Modal Sosial, kemudian dimensi kelompok dan jejaring. Sedangkan dimensi yang paling kecil dalam penyusunan Indeks Modal Sosial yaitu dimensi sikap percaya dan toleransi. Hal ini berarti bahwa dimensi aksi bersama dan resiprositas merupakan dimensi yang paling berperan dalam menentukan tinggi atau rendahnya nilai Indeks Modal Sosial. Namun, hal ini tidak kemudian menjadikan dua dimensi lainnya tidak penting dalam perhitungan indeks karena sebenarnya nilai kontribusi ketiga dimensi ini dalam perhitungan Indeks Modal Sosial tidak terlalu jauh

berbeda. Adanya hubungan negatif antara penghindaran pajak dan modal sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang merupakan cerminan dimensi-dimensi modal sosial berperan dalam pembentukan perilaku dunia usaha, termasuk kepatuhan pajak. Perilaku patuh pajak merupakan salah satu wujud kebersamaan/gotong royong warga negara dalam berkontribusi pada pembangunan. Sehingga ketika perusahaan beroperasi pada lingkungan yang memiliki dimensi aksi bersama dan resiprositas, dimensi kelompok dan jejaring, serta dimensi sikap percaya yang baik, maka akan dapat mendorong untuk lebih patuh dalam tanggung jawab perpajakannya.

Indeks Modal Sosial dari wilayah geografis dimana perusahaan berada mempengaruhi keputusan perusahaan. Hal ini karena perusahaan berusaha untuk membangun kesesuaian antara kegiatan mereka dengan norma dalam sistem sosial yang lebih baik. Indeks Modal Sosial yang dapat mengurangi perilaku penghindaran pajaknya. Dengan demikian lingkungan sosial berperan dalam keputusan perencanaan pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasana dan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa modal sosial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Indeks Modal Sosial yang rendah menyebabkan peningkatan penghindaran pajak. Wilayah operasi perusahaan di daerah dengan modal sosial tinggi kurang terlibat secara signifikan dalam kegiatan penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Chircop et al., (2018) bahwa modal sosial berpengaruh negatif terkait dengan penghindaran pajak. Jha and Cox (2015) yang mengatakan bahwa perusahaan yang berlokasi di daerah dengan Indeks Modal Sosial yang tinggi memperlihatkan tingkat tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih baik.

### Saran

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi fiskus untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak dengan mempertimbangkan Indeks Modal Sosial pada domisili operasi perusahaan tersebut. Keterbatasan penelitian berupa nilai *adjusted R*



*Square* pada penelitian ini tergolong rendah, yaitu hanya senilai 1,6 persen. Artinya, penghindaran pajak dipengaruhi sebesar 98,4 persen oleh variabel lain diluar variabel penelitian. Sehingga, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas lain yang terkait dengan karakteristik lingkungan bisnis, seperti kapabilitas dan kompetensi perusahaan, serta kondisi persaingan pasar.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh dosen, rekan, orang tua, karyawan dan seluruh civitas akademik di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang terlibat dan telah memberikan dukungan dalam penulisan penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada tim Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) Universitas Islam Lamongan yang telah mendukung dan membantu penyampaian hasil penelitian ini sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- (OECD), O. for E. C. and D. (2001). The Well-being of Nations. In *The Role of Human and Social Capital* (p. OECD). Perancis.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ardani, R. (2017). Hubungan Modal Sosial Dan Partisipasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Corporate Social Responsibility, 1–116.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Modal Sosial Tahun 2017*.
- Benk, S., Budak, T., & Cakmak, A. . (2011). An Investigation of Tax Compliance Intention: A Theory of Planned Behaviour Approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 28, 180–188.
- Bidin dan Shamsudin, F. . (2013). Using Theory of Reasoned Action to Explain Taxpayer Intention to Comply with Goods and Service Tax (GST). *Journal of Scientific Research*, 17(3), 387–394.
- Boone, J., Khurana, I., & Raman, K. (2012). Religiosity and tax avoidance. *The Journal of the American Taxaion Association*, 35(1), 53–84.
- Bourdieu, P. (1986). The Form of Capital, dalam Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. *Greenwood Press*, 8096, 1–12. <https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15>
- Chircop, J., Fabrizi, M., Ipino, E., & Parbonetti, A. (2018). Does social capital constrain firms' tax avoidance? *Social Responsibility Journal*, 14(3), 542–

565. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2017-0157>

- Fukuyama, F. (1995). *Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Gozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SOSS 20*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifan, L. . (1916). The Rural School Community Center. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 67, 130–138.
- Harsono, W. (2014). Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(2), 131–146. <https://doi.org/10.22146/jkap.7518>
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2003). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12, No 2(November 2010), 82–93.
- Jha, A., & Cox, J. (2015). Corporate Social Responsibility and Social Capital. *Journal of Banking and Finance*, 60, 252–270.
- Jousairi, H. (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Maharani, I., & Suardana, K. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 525–539.
- Muzakki, M. R. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak* (Vol. 4). Semarang.
- Putnam, R. D. (2016). Bowling alone: America's declining social capital. *Culture and Politics: A Reader*, 223–234. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-62397-6>
- Rahayu, S. K. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rupasingha, A., Goetz, S. J., & Freshwater, D. (2000). Social Capital and Economic Growth: A County-Level Analysis. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 32(3), 565–572. <https://doi.org/10.1017/s1074070800020654>
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Adimata.
- Setiawan, L. (2015). Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak OECD dan Government Finance Statistic Manual dan Pengaruhnya atas Pendefinisian Tax Ratio di Indonesia, 1–27.
- Soliha, Y., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan. *Jurnal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1), 1–10.

- Sudarmadji, A. M., & Sularto, L. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). Vol 2. Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus, 2*, A53–A61. <https://doi.org/10.1049/ip-f-1.1985.0021>
- Suminarsasi, W. S. (2011). Terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak ( tax evasion ). *SNA 15 Banjarmasin*, 0–29.
- Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 138. Retrieved from <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3112>
- Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan* (edisi 2). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.